

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Dalam rumusan Nasional tentang pendidikan menyebutkan bahwa

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” (UU RI, No. 20 Tahun 2003, BAB I, Pasal 1).

Dengan demikian, pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyiapkan peserta didik untuk menghadapi masa depannya sehingga para peserta didik dapat bersaing di masa yang akan datang. Pendidikan tidak terlepas dari perangkat yang menjadi penunjangnya, antara lain guru, siswa, sarana dan prasarana, kebijakan yang mengatur pendidikan itu sendiri, dan kurikulum yang akan membawa peserta didik kepada tujuan dari pendidikan yang ingin dicapai.

Banyak program pendidikan yang telah dirancang dan dikembangkan dengan baik, tetapi pada kenyataannya tidak diimplementasikan dengan baik. Padahal program itu sudah direncanakan dalam waktu lama menelan banyak dana dan tenaga tetapi tidak diimplementasikan sesuai dengan misi kurikulum dan desain tersebut menjadi sia-sia. Pemerintah Indonesia melalui menteri

pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan Permendikbud No.160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan kurikulum 2006 dan kurikulum 2013, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang melaksanakan kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan kurikulum Tahun 2006 (KTSP) dan kurikulum 2013. Dalam kebijakan atau aturan ini, pemerintah mengizinkan penggunaan kembali Kurikulum 2006 kepada sekolah yang baru menerapkan kurikulum 2013 selama satu semester dan akan menerapkan kurikulum 2013 pada waktu yang ditetapkan oleh kementerian. Selain itu, bagi sekolah yang telah menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga (3) semester tetap menggunakan kurikulum tersebut. Apabila sekolah tersebut ingin kembali menerapkan kurikulum 2006 maka sekolah tersebut harus melaporkan terlebih dahulu kepada dinas pendidikan. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam dunia pendidikan, yaitu yang berkaitan dengan penggunaan Kurikulum 2006 provinsi/kabupaten/kota (dalam Permendikbud RI, No. 160 Tahun 2014, Pasal 1 & 2).

Kurikulum 2013 merupakan hasil pengembangan dari kurikulum 2006 yang mengusung KTSP. Aspek perubahan ini dilandasi oleh perkembangan dalam dunia pendidikan, prediksi tentang masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan pedagogik, serta kebutuhan kompetensi dimasa yang akan datang. Pada hakikatnya pengembangan kurikulum dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dan tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu sumber daya manusia indonesia. Perkembangan kurikulum dianggap sebagai penentu masa depan bangsa, oleh karna itu kurikulum yang baik diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Sehingga akan menghasilkan masa depan anak bangsa yang cerah dan dapat berimplikasi pada kemajuan bangsa dan negara.

Kurikulum 2013 mencoba menjawab tantangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Implementasi kurikulum 2013 mengedepankan aspek *soft skill* dan *Hard skill* yang dirasa penting bagi peserta didik. Di mana kemampuan ini dirasa perlu diajarkan bagi kepentingan peserta didik ketika

masuk dalam lingkungan kerja maupun lingkungan sosial. Machali, (2014) berpendapat bahwa tujuan kurikulum 2013 pada dasarnya adalah mengembalikan pendidikan pada vitranya, yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya dimasa mendatang. Salah satu ciri kemampuan pada abad ke-21 adalah pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) menurut Kemendikbud RI pendidikan kecakapan hidup bertujuan untuk: (1) mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi; (2) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel; serta (3) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lingkungan sekolah, dengan memberikan peluang pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat. Penanaman konsep-konsep kewirausahaan bertujuan untuk membentuk peserta didik lebih mandiri dan kreatif, sehingga diharapkan ketika lulus mereka bukan hanya bekerja, tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru dengan berwirausaha. pada proses pembelajaran, kurikulum 2013 menjawab masalah penjelajahan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dengan mengimplementasikan pembelajaran terpadu dan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran pada mata pelajaran lainnya. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman peserta didik secara holistik yang memiliki rantai penghubung antara seluruh materi pembelajaran yang utuh. Menurut (Dyers, Gregersen & Christensen, 2009) Perubahan pendekatan pembelajaran yang berdasar pada pendekatan saintifik. Integrasi pendekatan saintifik pada setiap pembelajaran juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan kreatifitas yang mereka miliki. Hal ini juga dapat mengubah bentuk pembelajaran menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student Center*). Aspek penilaian pada kurikulum 2013 menurut pendapat Wiggins & Mc. Tighe (2011) bahwa evaluasi pembelajaran didasarkan pada penilaian autentik. Tujuannya adalah untuk menjawab masalah penilaian kompetensi peserta didik dalam konteks penilain proses dan hasil.

Desain kurikulum yang telah disusun perlu diimplementasikan. Tidak ada gunanya kurikulum didesain kalau tidak diimplementasikan dalam proses

pembelajaran. Menurut Saylor dan Alexander Pembelajaran di dalam kelas merupakan tempat untuk melaksanakan dan menguji kurikulum (dalam Ansyar, 2015:404). Dalam kegiatan pembelajaran semua konsep, prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat dan kemampuan guru diuji dalam perbuatan yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata karena implementasi kurikulum dalam pembelajaran di Sekolah merupakan bagian paling penting dalam program pendidikan. Wiles & Bondi mensinyalir lebih 90% kurikulum baru tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Fakta lain menunjukkan bahwa proyek inofasi kurikulum baru yang telah menelan dana besar, tetapi proyek itu tidak efektif (Ansyar, 2015:104). kebanyakan kurikulum baru itu tersimpan dalam tumpukan naskah yang dipenuhi debu dalam lemari pimpinan sekolah, atau “tersangkut” dipintu lokal sekolah (Ansyar,2015:104). Menurut Wiles & Bondi, salah satu penyebab kurikulum gagal dilaksanakan dalam pembelajaran adalah karena sekolah dan pendidik umumnya kurang menguasai keterampilan manajerial dan kemampuan implementasi kurikulum. Penyebab lain ialah karena implementasi kurikulum belum dianggap sebagai hal penting. Menurut Sarason kebanyakan implementasi reformasi pendidikan gagal, karena orang (*people*), sebagai pelaksana kurikulum kurang paham kultur sekolah (Ansyar, 2015:405).

Sorenson *et al.* mengungkapkan bahwa efektifitas perubahan kurikulum bermula dari kepala sekolah yang melakukan banyak pertemuan tatap muka (Ansyar, 2015:409), Hal ini Senada dengan pendapat Wahyudin, (2014) yang menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses menggerakkan, mempengaruhi dan membimbing orang lain atau kelompok guna mencapai tujuan, selain itu seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam mengambil dan membuat keputusan serta harus ada interaksi individual dan kelompok tentang perubahan kurikulum untuk meyakinkan guru agar memiliki pemahaman yang kompherensif tentang perubahan kurikulum. Yimaki (2012) dalam penelitiannya yang bertajuk *Curriculum Leadership in a Conservative Era, Educational Administration* menyatakan bahwa perlunya bidang baru kepemimpinan kurikulum di antara administrasi Pendidikan dan studi kurikulum.

Menurut Levine, ada lima pedoman pokok agar implementasi kurikulum terlaksana dengan baik yaitu: (1) Perubahan untuk meningkatkan pembelajaran siswa harus benar secara teknis dan ilmiah, misalnya perubahan itu berdasarkan hasil riset tentang perubahan apa yang akan berhasil dan apa yang tidak akan berhasil; (2) inofasi kurikulum yang sukses mengharuskan perubahan struktur sekolah tradisional; (3) perubahan harus bisa dikelola dan dilaksanakan oleh sebagian besar guru; (4) implementasi perubahan yang sukses harus bersifat organik dari pada birokratik; melalui pendekatan adaptif dengan mempertimbangkan masalah besar yang dihadapi sekolah dan kondisi sekolah; dan (5) kurikulum perlu fokus pada upaya, waktu dan dana yang memadai dengan kegiatan yang jelas konten yang rasional dan pelaksanaan yang tepat sasaran (Ansyar, 2015). Keberhasilan inovasi kurikulum Menurut Ornstein & Hunkins tergantung pada perencanaan yang matang atas tiga pilar yaitu: 1). Program pendidikan (kurikulum); 2). Orang (pelaksana perubahan); 3) Organisasi (perananan kepala sekolah. (Ansyar, 2015:417).

Implementasi Kurikulum 2013 juga menjadi hal yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut. Peninjauan tersebut meliputi respon guru dalam menerima dan mengimplementasikan kurikulum 2013. Serta pemahaman guru terhadap kurikulum 2013. Berdasarkan tinjauan tersebut ditemukan bahwa sebanyak 23-25 % guru yang belum memahami secara komprehensif kebijakan kurikulum 2013. Selain itu terdapat 13-25% guru yang kurang terampil dalam mengimplementasi kurikulum 2013 (Nurwicaksono. 2014) .

Pada penelitian yang dilakukan oleh Susilana & Rusman (2015) yang bertajuk Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar juga menemukan bahwa respon guru terhadap implementasi kurikulum 2013 adalah positif, tetapi masih ada guru yang belum mengimplementasi kurikulum 2013 pada tiga kegiatan yaitu sebanyak 16% walaupun responden pada penelitian ini adalah guru yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013, artinya masih ada guru yang belum memahami dan belum mengimplementasikan kurikulum 2013. Sementara terdapat 20% guru yang merespon negatif terhadap pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Disebabkan karna pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan dan

penilaian otentik sehingga kemungkinan dua hal ini belum dipahami dengan baik oleh guru yang merespon negatif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Wahyudin, Rusman & Rahmawati, (2017) juga menemukan bahwa kesulitan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah mencakup: (1) keterbatasan waktu dan kemampuan siswa yang berbeda; (2) daya dukung masyarakat yang kurang optimal, seperti orang tua siswa dalam masyarakat sekitar, serta sarana yang kurang ideal; (3) menyesuaikan kegiatan yang akan dilakukan dengan karakter kelas; (4) mencari pembelajaran yang konkrit dan dapat dilaksanakan anak serta mencari media yang mendukung pembelajaran; (5) keterbatasan waktu, karna sistemnya menggunakan jam pelajaran; (6) dana yang belum mencukupi dan waktu yang sulit, karena jadwal mengajar yang banyak; (7) menentukan indikator yang sesuai; (8) siswa mempunyai karakter yang berbeda, tingkat kecakapan yang dimiliki berbeda, dan kebiasaan siswa dirumah cukup memberikan pengaruh; serta (9) kemampuan *life skill* anak-anak sangat beragam sehingga sulit untuk memenuhi ketercapaian semua siswa dan kebiasaan rumah anak berbeda-beda.

Keseimbangan antara teori dan praktik, kecakapan dalam menggunakan pendekatan, metode dan strategi pembelajaran yang tepat menjadi penunjang utama dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar secara efektif. Secara empirik hasil yang selama ini dilakukan ternyata masih belum memuaskan, terutama dilihat dari kemampuan secara praktis. Perlu penyediaan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penerapan kurikulum baru dalam proses pembelajaran. Macphail & Halbert (2005) juga dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk menerapkan kurikulum dan silabus yang baru direvisi pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani diperlukan penyediaan waktu dan biaya dan juga dukungan dari kepala Sekolah.

Pendekatan-pendekatan baru dalam pengembangan dan implementasi kurikulum 2013 harus diimplementasikan, senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilana & Ikhsan (2014) tentang “ Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 berdasarkan kajian teori belajar” dalam penelitian ini,

Susilana & Ikhsan mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam pendekatan saintifik dapat memicu muncul dan terciptanya berbagai pengalaman belajar yang diperoleh siswa dengan melibatkan seluruh pancaindera, fisik, dan psikis siswa sehingga membantu mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya.

Undang-Undang Sisdiknas pasal 17 menyatakan bahwa “Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan Menengah”. Jenjang pendidikan dasar merupakan cikal bakal pendidikan yang akan menentukan kualitas pendidikan pada jenjang berikutnya. Keberhasilan menangani masalah pada jenjang pendidikan dasar merupakan langkah yang strategis untuk memperbaiki kualitas pada jenjang berikutnya, dan sistem pendidikan pada umumnya. Salah satu jalur untuk mendapatkan pendidikan yang layak adalah melalui lembaga formal yaitu sekolah. Sekolah sendiri merupakan lingkungan tempat belajar dan memperoleh ilmu bagi para siswa. Sekolah sebagai salah satu lingkungan yang penting bagi siswa diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang demokratis agar terjadi proses belajar yang menyenangkan. Keadaan sekolah yang demikian diharapkan mampu melahirkan calon-calon penerus yang berkompeten dan memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan masa depan seperti globalisasi dan pasar bebas, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan lain sebagainya.

Pada peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua pada Bab IX pasal 28 menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Yang berlaku di Propinsi Papua adalah kurikulum nasional dan kurikulum lokal dan pada pasal 29 mengatur tentang kurikulum nasional diberlakukan di semua jalur jenjang dan jenis pendidikan serta bahan ajar kurikulum nasional dipadukan dan disesuaikan dengan keanekaragaman fisik, hayati, bahasa dan sosial di Papua. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan di Papua adalah satu kesatuan sistem dengan sistem pendidikan secara nasional sehingga kurikulum yang harus diimplementasikan di Papua adalah sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 160 ayat 1 dan 2 yaitu Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Tata kelola berbagai perkembangan dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan berbagai komponen penunjang pendidikan yang berpengaruh terhadap kegiatan Proses Pembelajaran baik secara formal, nonformal dan informal telah diatur dalam Perdasi. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua mengamanatkan tentang Pendidikan tertuang dalam pasal 56 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Ayat 1 dari pasal 56 menyatakan bahwa “Pemerintah Propinsi bertanggung Jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan di tanah Papua” sedangkan pada ayat 3 memerintahkan bahwa “setiap penduduk Propinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sampai pada pendidikan menengah dengan beban masyarakat yang serendah-rendahnya” kedua ayat ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah keterbatasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan hak penduduk tanah Papua untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Ada dua pemahaman penting yang terkandung dalam amanat Undang-Undang Otsus Pasal 56 ayat 3 yaitu pertama, setiap penduduk papua tanpa terkecuali, berhak memperoleh hak yang memadai terhadap pendidikan dan kedua pendidikan yang dimaksud bagi penduduk di Papua adalah pendidikan yang bermutu. Masalah pendidikan di Papua sangat bertolak belakang dengan amanat Undang-Undang Otsus pasal 56 ayat 3. yang paling mencolok adalah masalah implementasi kurikulum yang belum bisa sepenuhnya menyesuaikan dengan standar kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum yang diimplementasikan di Papua dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah sehingga alhasil Menurut Modouw, (2013:209) jumlah penyandang buta aksara di Papua telah menembus angka statistik tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 36%. Hal ini disebabkan oleh buruknya proses pengelolaan sekolah-sekolah dasar selama ini. Dan untuk mengetahui penyebab utama masalah-masalah pendidikan di Papua, Maka atas permintaan dinas pendidikan propinsi papua yang difasilitasi oleh USAID, Unicef melakukan penelitian ketidakhadiran guru-guru di Sekolah-

Sekolah Dasar di Papua pada tahun 2011 dan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata 37% guru tidak melaksanakan tugasnya. Di kawasan pegunungan kurang lebih 50% guru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Terlebih lagi kepala-kepala sekolah 67-70% tidak hadir disekolah karena berbagai alasan. Oleh karena itu, menurut Modouw, (2013:210) untuk mengurangi benang kusut ini harus dimulai dari kepemimpinan pemerintah yang tegas dan cerdas, khususnya pemerintah kabupaten dan kota.

Diperlukan tata kelola pendidikan dengan dana yang memadai agar kelengkapan proses belajar mengajar dapat disediakan sebagaimana mestinya. pemerintah dan semua pihak yang terlibat dalam pengawasan dan evaluasi harus melakukannya secara berkelanjutan. Peranan pemerintah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Papua hingga UPTD di tingkat kabupaten sangat diharapkan. Sehingga kualitas pendidikan di Provinsi Papua khususnya di daerah-daerah tertinggal bisa ditingkatkan sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah pusat.

Hasil penelitian Sparapani, *et al.* (2014), menyimpulkan bahwa kebijakan tidak memberi tahu guru bagaimana menerjemahkan standar atau penilaian ke dalam instruksi, yang sering kali mengarah pada pemberlakuan kebijakan sehingga perlu pemahaman dan kesadaran yang mendalam dari pendidik bahwa pengajaran dan pembelajaran adalah kegiatan kompleks yang berkembang dari konteks sosial dan budaya.

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Clarke & Wildy (2011) yang menguraikan tentang bagaimana kabupaten memberikan dukungan profesional kepada kepala sekolah di lingkungan terpencil sehingga dapat menghasilkan wawasan yang kaya akan strategi yang membantu kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja dan vitalitas sekolah-sekolah dan komunitas mereka, oleh karena itu kewajiban semua sistem untuk memperbaiki, merenungkan dan mengoptimalkan proses yang digunakan untuk memperbaiki pendidikan seutuhnya.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki banyak ciri khas baik itu dari segi budaya, adat istiadat hingga pendidikan. Pendidikan di Kabupaten Mimika

sudah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Namun, beberapa penyelenggaraan pendidikan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan prosedur. Salah satu penyelenggaraan pendidikan yang belum sesuai dengan standar pendidikan nasional adalah implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 di Kabupaten Mimika masih belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik, sejauh pantauan penulis, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas pembelajaran masih dilakukan per-mata pelajaran sehingga belum terlihat penerapan tematik integratif serta dalam proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sehingga terkesan guru tidak menggunakan pendekatan saintifik, Hal ini dibenarkan oleh salah satu wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum di SD YPK Ebenhaezer Kabupaten Mimika, beliau mengatakan bahwa kurikulum yang diimplementasikan belum sepenuhnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah, disebabkan karna guru-guru masih mengalami kendala dalam menerapkan pembelajaran tematik, ungkap Napitupulu Via telepon (28 Januari 2018).

Peranan peneliti diharapkan untuk bisa secara ilmiah mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Mimika. Publikasi harus meningkat dari segi kualitas dan kuantitas supaya pendidikan disana bisa dipotret. Potret ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengatasi atau memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Jadi, persepsi-persepsi dan pendapat yang telah dikemukakan tentang pendidikan di Kabupaten Mimika harus dibuktikan dengan suatu penelitian sehingga pemerintah bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan faktual.

Penelitian ini berjudul **“Implementasi Kurikulum 2013 Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua.”** Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan situasi implementasi kurikulum yang ada di Kabupaten Mimika . Penelitian ini difokuskan di tingkat sekolah dasar. Peneliti akan menyelidiki tentang implementasi kurikulum kurikulum 2013 di sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Besar harapan peneliti bisa berkarya dan mengabdikan untuk bangsa melalui penelitian ini

sehingga pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Mimika Provinsi Papua bisa ditingkatkan mutunya.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Mimika Propinsi Papua?

Peneliti seyogyanya menyajikan rambu-rambu yang dapat menuntun pembaca melewati semua tahap penelitian. dari tujuan penelitian hingga peneliti bisa mempersempit fokus penelitian dengan menyajikan rumusan masalah. yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru sekolah dasar yang berada di Kabupaten Mimika?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 di sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mimika?
3. Bagaimana penilaian pembelajaran pada jenjang Sekolah Dasar yang berada di Kabupaten Mimika?
4. Faktor apa saja yang mendukung implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Mimika?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi kurikulum 2013 pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Mimika. Berdasarkan tujuan yang bersifat umum tersebut, dijabarkan beberapa tujuan yang lebih khusus.

- a. Mengetahui perencanaan yang dilakukan oleh guru dalam implementasi Kurikulum 2013 pada j sekolah dasar di Kabupaten Mimika.
- b. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 di sekolah dasar Kabupaten Mimika.
- c. Mengetahui penilaian pembelajaran yang dilakukan guru sekolah dasar yang berada di Kabupaten Mimika.

- d. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mendukung implementasi kurikulum 2013 pada sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mimika.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan prinsip yang dapat memperkaya teori dan praktek dalam implementasi kurikulum 2013. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan bisa bermanfaat bagi semua orang yang bergelut dengan masalah pendidikan di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Mimika. Maka, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu kurikulum, khususnya terkait implementasi kurikulum 2013 di Indonesia. Kurikulum 2013 sudah semestinya diimplementasikan secara optimal. Adanya kurikulum 2013 diharapkan dapat meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan serta dapat menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menggambarkan implementasi kurikulum 2013 dan juga berbagai faktor yang memberikan kontribusi terhadap kualitas implementasi kurikulum 2013. Terkait dengan faktor guru dilihat berdasarkan perencanaan kurikulum, pelaksanaan serta penilaian pembelajaran. Dengan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diharapkan dapat dicarikan solusi bagi upaya peningkatan kualitas implementasi kurikulum 2013 di Papua dan di seluruh bumi pertiwi Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan bisa bermanfaat bagi semua orang khususnya yang bergelut dengan masalah pendidikan di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Mimika. Secara rinci hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

a. Bagi Guru

Dari hasil penelitian ini, diharapkan guru mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Kurikulum 2013, serta selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas dan melakukan introspeksi baik yang menyangkut kualitas teknis maupun kualitas sosial sehingga guru mampu tampil sesuai dengan tuntutan profesinya.

b. Bagi Kepala Sekolah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah, karakteristik daerah serta kemampuan peserta didik

c. Dinas Pendidikan

Bagi dinas pendidikan Kabupaten Mimika, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan-masukan yang kemudian dipertimbangkan dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan kualitas guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013.

3. Manfaat Bagi Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi penelitian lanjutan dan memberikan wacana tentang berbagai aspek implementasi kurikulum 2013 yang dapat dikaji lebih mendalam selain dari indikator yang telah dibahas dalam penelitian ini.